

REVIVALISME ISLAM VERSUS KEADILAN GENDER

*Zusiana Elly Triantini**

Abstrak

Gender as a subject itself has been around for quite some time in Indonesia, as has the fight for it by government and non-government organizations. Why is it then, that many victimized women still find themselves devoid of rights? Many contemporary views have cast the topic of gender equality as a virus to Indonesian women, especially Muslim women. So why does the fight for gender equality seem stagnant? It seems that for Indonesia, such a cause is mired in by many obstacles. The great wall of patriarchic culture and such defaming claims by 'Islamic' revivalist movements such as HTI, MMI or KPPSI have long lives indeed. Helped along by the comfortable armchair position of men, firmly entrenched in society and backed up by a headstrong dogmatic position on religious interpretation. Sadly, many women still nod to such a position, accepting it as one of the facts of life. Such phenomenon has driven the writer to realize that the struggle for gender equality is far from over. And that a mapping out and elaboration on the extent of challenges facing it would be most beneficial to those fighting for it. In hopes that it would help them in designing proper strategies to more effectively campaign for equality.

Key Word: Keadilan, Gender, Revivalisme Islam,

I. Pendahuluan

Jika berbicara Islam di Indonesia dari segi kuantitas, maka tidak ada kekhawatiran karena Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Tetapi, jika dilihat dari segi kualitas, maka masyarakat muslim Indonesia patut khawatir, meski tidak berlebihan. Segi kualitas yang dimaksud adalah bukan soal *ubudiyah* masyarakat muslim Indonesia

* Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

yang dipertanyakan atau diragukan, melainkan soal relasi sosial (*muamalah*) dan politik (*siyasah*) yang sedang menghangat dan terkadang juga memanas. Memang keadaan ini tidak terlalu terlihat membahayakan keberadaan umat Islam di permukaan, karena persoalan relasi sosial tersebut dimunculkan oleh sebagian kecil kelompok. Namun, dari yang kecil tersebutlah “virus klaim kebenaran” (*truth claim*) telah mengancam stabilitas sosial politik umat Islam.¹

“Virus klaim kebenaran” tersebut juga telah banyak mengorbankan satu golongan tertentu di masyarakat, yaitu perempuan. Padahal, beberapa dekade terakhir ini, dimulai sejak 1970, dan digaungkan lebih keras pasca reformasi, perempuan telah mengalami kemajuan (meski belum maksimal) dalam hal penghormatan hak. Bencana itu kemudian muncul perlahan-lahan -meski tak begitu terasa- setelah “virus klaim kebenaran” disebarkan di kalangan umat Islam di Indonesia. Lagi-lagi perempuan dihadapkan pada pusaran “klaim kebenaran” dari pihak tertentu tentang penafsiran agama yang bias gender.

Memang benar, bahwa “klaim kebenaran” bukan “barang” baru di tengah perjuangan keadilan gender di dunia, khususnya di Indonesia. Namun kemunculannya akhir-akhir ini, terutama pasca bergulirnya demokrasi “serba-serbi” di Indonesia menjadi satu persoalan yang sedang dan harus diperhatikan. Dikarenakan klaim kebenaran ini, penghakiman terhadap kelompok tertentu yang tidak sefaham telah menjadi penyakit lanjutan yang tak kunjung dapat dihentikan.

Siapa saja penyebar “virus klaim kebenaran”, apa tujuan mereka, mengapa mereka melakukan gerakan tersebut serta bagaimana pengaruhnya terhadap perjuangan keadilan gender di Indonesia adalah beberapa pertanyaan yang melandasi uraian dalam tulisan ini.

¹ Jika *truth claim* dipahami secara mentah emosional akan menimbulkan banyak masalah. Sejarah menjadi saksi perselisihan, pertikaian, konflik dan peperangan antar komonuitas agama baik dikawasan Asia, Afrika, Eropa maupun Amerika. Pembahasan tentang wacana ini, baca M. Amin Abdullah, *Studi Agama, Normativitas atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 50.

II. Seputar Revivalisme Islam di Indonesia

Demokrasi “serba-serbi” yang hadir di Indonesia pada akhirnya memberikan peluang pada bangkitnya kembali gerakan Islam di Indonesia setelah sekian lama ditenggelamkan oleh Orde Baru. Meskipun saat ini mereka bangkit dengan wajah lain, tetapi mereka terlahir dari satu “klan” pemikiran yang sama. Inilah yang disebut dengan revivalisme Islam di Indonesia.

Gejala revivalisme Islam ini muncul dalam bentuk intensifikasi penghayatan dan pengamalan Islam yang diikuti dengan pencarian dan penegasan kembali nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Adakalanya revivalisme hanya mengambil bentuk intensifikasi keislaman yang lebih berorientasi ke dalam (*inward oriented*) dan karenanya sering lebih bersifat individual (psikologis). Namun di sisi lain (pada kasus-kasus radikalisme Islam misalnya), intensifikasi itu juga diarahkan ke luar (*outward oriented*), dengan demikian lebih bersifat sosial, bahkan politis. Tegasnya, intensifikasi bisa berupa sekedar peningkatan *attachment* pribadi terhadap Islam dan sebab itu banyak mengandung dimensi esoteris, tetapi proses intensifikasi tersebut dapat juga menjelma dalam bentuk komitmen yang tinggi, tidak hanya untuk mentransformasikan kehidupan individual, tetapi sekaligus juga kehidupan komunal dan sosial dan oleh karena itu sering bersifat eksoteris.²

Apa sebenarnya yang mendorong timbulnya gerakan revivalisme Islam di Indonesia? Ada beragam faktor, di antaranya faktor sosio-psikologis umat Islam yang kecewa terhadap kebijakan dan program Orde Baru yang dinilai lebih menonjolkan pandangan keislaman yang modern dan sekuler. Menurut mereka, upaya modernisasi yang sangat gigih dijalankan Orde Baru mengakibatkan umat Islam Indonesia kehilangan identitas, nilai, dan menjadi penyebab bagi timbulnya krisis moral. Sebagai respon terhadap kegagalan tersebut, muncul gerakan revivalisme Islam yang menyerukan kembali ke konsep Islam “sejati”, Islam sebagaimana di praktekkan pada masa Rasul dan para sahabatnya. Menurut kelompok revivalis ini, Islam yang diacu adalah Islam yang pernah “jaya” dalam sejarah peradaban umat manusia,

² Seperti penuturan Azumardi Azra yang dikutip oleh Farha Ciciek, *Tashwirul Afkar*, Edisi No. 5 Tahun 1999 (Jakarta: Lakpesdam NU, 1999), 34.

yakni Islam klasik pada zaman Rasulullah sampai daulah Abbasiyah. Sayangnya, mereka lebih mengadopsi identitas keislaman yang bersifat fisik³ dan menafikan kekurangan yang ada pada masa yang dianggap “jaya” tersebut.

Di tengah kekecewaan dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, kelompok-kelompok revivalis ini hadir untuk menawarkan berbagai konsep yang mereka “klaim kebenarannya”. Mereka berpandangan bahwa sistem *Daulah Islamiyah*, *Khilafah*, *Syari’ah* dll, akan membawa Indonesia menjadi negara yang sejahtera, damai, dan terjaga moral masyarakatnya. Bahkan mereka dengan tegas menyatakan bahwa syari’at Islam adalah solusi terbaik bagi umat saat ini. Mereka antara lain Hizbut Tahrir Indonesia (HTI),⁴ Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)⁵, Komite Persiapan Penegakan Syari’at Islam (KPPSI).⁶

³ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2006), 46.

⁴ Awalnya, Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik Islam di Palestina yang dakwahnya berpijak di atas keharusan mengembalikan *khilafah Islamiyah* dengan bertumpang kepada *fikrah* (ide) sebagai sarana paling pokok dalam perubahan. Partai ini telah mengeluarkan ijtihad-ijtihad *syar’i* yang kontroversial dan mengundang pro-kontra di kalangan ulama-ulama Islam. Kelahiran Hizbut Tahrir Indonesia dibidani dan dipelopori oleh beberapa orang anggota dan simpatisan HT yang telah bersentuhan langsung dengan gerakan ini di Timur Tengah. Oleh karena itu, tidak heran jika nama, bentuk, doktrin, ideologi dan metode gerakannya benar-benar mengikuti HT di Timur Tengah. Bahkan HTI merupakan cabang resmi dari jaringan HT Internasional dan bertanggungjawab kepada pengurus pusat HT di Yordania. Nama-nama yang selalu disebut sebagai tokoh dan pemimpin HT antara lain Syaikh Taqiyuddin Nabhani, Abdul Qadim Zallum, ‘Atha Abu Rusyath. Sedangkan tokoh dan pemimpin yang sering disebut dalam HTI antara lain Mama Abdullah Bin Nuh, Muhammad al-Khaththath, dan Ismail Yusanto. Penjelasan tentang HTI ini bisa dibaca dalam A.Maftuh Abegebriel dan Ibida Syitaba, “Fundamentalisme Islam, Akar Telogis dan Politis,” dalam *Negara Tuhan; The Thematic Encyclopedia* (Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2004), 501. Juga Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syari’at Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia* (Jakarta: PSAP, 2007), 409-411.

⁵ Gerakan ini lahir berawal dari keprihatinan para tokoh gerakan Islam yang pernah digembleng di “pesantren Orde Baru” seperti Irfan Suryahardi, Deliar Noer, Syahirul Alim, Mursalin Dahlan, Mawardi Noor dan lain-lain yang terdorong untuk mengadakan forum kecil, berdiskusi dan berujung pada gagasan untuk melahirkan suatu lembaga yang dapat menyatukan visi kaum muslimin yang hendak memperjuangkan tegaknya syariat Islam. Lebih lanjut lihat dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Mujahidin_Indonesia

⁶ Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) ini lahir di Sulawesi Selatan adalah sebuah komite atau panitia independen yang mempunyai visi mempersatukan

Sistem keyakinan dan paham ketiga kelompok ini hampir sama, meski dalam tataran strategi dan orientasi berbeda. Ketiganya berpandangan bahwa negara Islam, khususnya negara Khilafah merupakan institusi yang penting dan mendasar bagi tegaknya syari'at Islam. Menurut Majelis Mujahidin Indonesia syari'at Islam dapat berfungsi dengan baik, dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dengan terbentuknya pemerintahan atau negara yang berlandaskan syari'at Islam. Sedangkan Hizbut Tahrir berpandangan bahwa negara Islam adalah negara Allah SWT, negara yang memberlakukan syari'at Islam, dan kedaulatan di tangan Allah SWT. Negara Islam memiliki tiga komponen penting sebagai prasyarat berdirinya negara Islam yaitu; masyarakat Islam, hukum Islam, dan *khalifah*.⁷ Di sisi lain, KPPSI menyatakan bahwa syari'ah Islam adalah solusi masa depan dan masa kini, terutama dalam mengatasi krisis, dan masyarakat membutuhkan budaya baru yaitu budaya Islam.⁸

Di antara kelompok pejuang syari'at Islam tersebut, Hizbut Tahrir Indonesia menyatakan bahwa mereka telah berhasil membangun jaringan kerja di antara berbagai organisasi Islam di Indonesia seperti mendirikan Forum Umat Islam, yang di dalamnya tergabung 31 organisasi Islam seperti; Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan ormas lain yang mendukung terselenggaranya Konferensi Khilafah International pada 12

segenap potensi umat Islam Sulawesi Selatan untuk penegakan syari'at Islam. Misinya adalah penegakan syari'at Islam di Sulawesi Selatan secara legal formal melalui perjuangan politik konstitusional, demokratis, dan tetap dalam bingkai NKRI. Baca, Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syari'at Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia* (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2007), 287-290. Baca juga, Andi Muawiyah Ramly dkk, *Demi Ayat Tuhan, Upaya KPPSI Menegakkan Syariat Islam* (Jakarta: OPSI, 2006).

⁷Javid Iqbal, "Demokrasi dan Negara Islam Modern" dalam John L Esposito dan John O Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek*, terj. Rahman Astuti (Bandung: Mizan, 1999), 321-322, lihat juga dalam Khamami Zada, *Islam Radikal* (Jakarta: Teraju, 2002), 110.

⁸ Andi Muawiyah Ramly dkk, *Demi Ayat Tuhan*, 141.

Agustus 2007.⁹ Yang menjadi persoalan kemudian, apakah 31 organisasi tersebut akan menerima ideologi yang diajarkan oleh HTI dan mempraktikannya, ataukah menolak dan menerimanya sebagai salah satu bentuk perbedaan pandangan di kalangan umat Islam saja?

Pertanyaan di atas menjadi penting karena menurut John L. Esposito sebagaimana dikutip oleh Haedar Nashir,¹⁰ revivalisme Islam memiliki karakter keyakinan umum. *Pertama*, Islam adalah pandangan yang total dan lengkap (agama integral dengan politik, hukum dan masyarakat). *Kedua*, kegagalan masyarakat-masyarakat Muslim disebabkan oleh penyimpangan mereka dari jalan lurus Islam dan mengikuti jalan sekular Barat, dengan ideologi dan nilai-nilai yang sekular dan materialistis. *Ketiga*, pembaruan masyarakat untuk kembali kepada Islam, sebuah reformasi atau revolusi religio-politik, yang mengambil inspirasinya dari Al-Qur'an dan gerakan besar Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad. *Keempat*, memulihkan kekuasaan Tuhan dan meresmikan tatanan sosial Islam sejati, hukum-hukum buatan manusia digantikan dengan hukum Islam yang bisa diterima oleh masyarakat Muslim. *Kelima*, meski mengecam segala sesuatu dari Barat, namun kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sebagai bentuk modernisasi diterima asalkan dijalankan di bawah akidah dan nilai-nilai Islam. *Keenam*, proses Islamisasi atau reislamisasi ditujukan kepada pribadi-pribadi yang dianggap berdedikasi dan terlatih, sehingga dengan mudah mereka mengajak orang untuk lebih taat dan berjihad.¹¹

Jika organisasi yang diklaim sebagai jaringan HTI tersebut menerima ideologi yang diajarkan dan mempraktikannya (termasuk keenam pemahaman di atas), maka bahaya keterpurukan atau kemunduran umat Islam kemungkinan besar akan terjadi, bahkan hal ini akan membahayakan kesatuan NKRI. Sedangkan jika mengambil sikap untuk menolak dan menganggapnya sebagai perbedaan, maka akan tercipta harmonisasi di kalangan umat Islam di Indonesia. Respon organisasi Islam tersebut juga

⁹ Pengantar Makalah Konferensi *Khilafah* International pada 12 Agustus 2007.

¹⁰ Haedar Nashir, *Gerakan Islam*, 160-161.

¹¹ *Ibid.*

akan berpengaruh besar terhadap perjuangan kesetaraan atau keadilan gender yang telah lama diperjuangkan di Indonesia.

III. Menilik Perjuangan Gender di Indonesia

Jika dilihat secara historis, gerakan perjuangan kesetaraan gender di Indonesia, bukanlah hal baru. Sejak masa penjajahan Belanda, Kartini, seorang perempuan bangsawan Jawa, anak seorang bupati di Jepara memulai sebuah gerakan untuk mencapai persamaan hak-hak perempuan di ruang publik. Kartini adalah simbol emansipasi dan keadilan perempuan di Indonesia dan semua bentuk partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial politik Indonesia kontemporer seringkali dihubungkan dengan jasa-jasanya. Hasrat Kartini untuk memajukan kaum perempuan pada zamannya merepresentasikan kebangkitan satu kesadaran baru yang tengah berkembang di kalangan bangsa Indonesia, di mana kemajuan menjadi satu wacana sosial dan intelektual yang dominan. Dia diakui sebagai simbol dari awal gerakan emansipasi perempuan di Indonesia, dan menjadi pelopor kebangkitan perempuan Indonesia.

Paruh abad selanjutnya, perjuangan kaum perempuan mulai dirintis di beberapa tempat, termasuk dalam organisasi Islam, seperti Muhammadiyah (Aisiyah) dan NU (Muslimat). Selain itu, organisasi perempuan yang didirikan oleh partai politik – seperti gerwani- juga hadir sebagai bentuk perhatian dunia Islam dan dunia politik terhadap perempuan pada saat itu.

Setelah itu, pada masa Orde Baru perempuan mulai dipetakan dan dikelompokkan oleh pemerintah, bahkan diberikan program yang “dipukul rata” di seluruh Indonesia berupa PKK dan Darma Wanita sebagai wujud “perhatian pemerintah” yang memasung apresiasi perempuan.

Pasca Orde Baru, perempuan mulai dapat mengapresiasi wacana gender dan terus berkembang hingga saat ini. Akan tetapi, perkembangan mutakhir di Indonesia menyatakan bahwa jalan yang pernah dirintis Kartini dan di kembangkan kembali pasca Orde Baru bisa jadi tidak bisa dipertahankan dan dikembangkan dengan baik berkaitan dengan fakta-fakta bahwa aktivitas pemberdayaan dan kesetaraan perempuan kontem-

porer menghadapi sejumlah rintangan. Salah satunya berasal dari gerakan Islam revivalis yang cenderung menolak persamaan hak laki-laki dan perempuan, serta menganjurkan perempuan kembali ke wilayah domestik. Lebih dari itu, mereka juga meyakini bahwa Islam tidak membolehkan keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik.¹²

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi perempuan untuk melakukan gerak yang bebas dalam ruang-ruang publik dan mendapatkan hak—haknya sebagai manusia bukan hanya budaya patriarkhi¹³ yang masih kental di Indonesia, tetapi perempuan juga harus berhadapan dengan norma agama (dalam hal ini Islam) yang banyak ditafsirkan dengan berbagai cara pandang yang akhirnya melahirkan kontroversi.

Berbagai kontroversi pandangan dan penafsiran yang muncul dari para pemikir wacana perempuan banyak dipengaruhi oleh nalar berfikir, metode pendekatan yang digunakan, teori yang dilibatkan dan tentu didorong oleh sistem serta semangat zaman pada saat pemikiran tersebut muncul.

IV. Bayang-bayang Revivalisme Islam Politik terhadap Perjuangan Keadilan Gender

Revivalisme Islam merupakan konstruksi dan movement yang ingin membangkitkan kembali Islam dalam situasi yang dianggap krisis oleh

¹² Pradana Boy ZTF, *Fikih Jalan Tengah, Dialektika Hukum Islam dan Masalah-Masalah Masyarakat Modern* (Jakarta: Hamdalah, 2008), 114.

¹³ Patriarkhi oleh kalangan feminis diartikan sebagai suatu sistem otoritas laki-laki yang menindas perempuan melalui institusi sosial, politik dan ekonomi. Dalam setiap bentuk historis masyarakat patriarkhis baik yang feodal, kapitalis maupun sosialis, sebuah sistem yang berdasarkan gender dan jenis kelamin serta diskriminasi ekonomi beroperasi secara simultan. Patriarkhi mempunyai kekuatan dari akses laki-laki yang lebih besar terhadap sumber daya yang ada dan ganjaran dari struktur otoritas di dalam dan di luar rumah. Konsep ini dipandang penting oleh para feminis karena feminisme memerlukan istilah yang mengekspresikan totalitas relasi yang menindas dan eksploitatif yang mempengaruhi eksistensi perempuan. Oleh karena itu, istilah ini sering kita dengar apabila membahas tentang perempuan khususnya di Indonesia. Lebih jelas lihat Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme* (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2002), 332-335.

mereka.¹⁴ Gerakan kelompok ini akan berlangsung lama, karena perjuangan yang mereka lakukan melalui beberapa tahapan; pengkaderan, interaksi sosial (penyebaran paham), dan pencapaian kekuasaan (termasuk dengan cara revolusi).

Kelompok revivalis sangat antipati terhadap paham yang berasal dari pemikiran Barat, seperti pluralisme, demokrasi, feminisme dll. Rasa antipati tersebut bukan karena isi paham yang dianjurkan, melainkan karena asal muasal paham tersebut. Mungkin jika paham-paham tersebut terlahir dari Timur Tengah dan “berbau” Arab maka mereka akan menerimanya. Hal ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap doktrin Barat dan perjuangan penegakan Syari’at Islam hanyalah keinginan politik belaka.

Penulis menjadi teringat apa yang dikatakan oleh Musthofa Bisri bahwa upaya penegakan syari’at Islam oleh kelompok revivalis dengan mendirikan negara Islam menjadikan agama menjadi ideologi yang batas-batasnya akan ditentukan berdasarkan kepentingan politik. Islam yang sejatinya bersifat terbuka dan luas, hidup layaknya organisme yang komunikatif dan interaktif dengan situasi dan kondisi para penganutnya akan dibungkus dalam kemasan ideologis dan berubah menjadi monumen yang diagungkan tanpa peduli tujuan luhur agama itu sendiri. Selain itu, upaya menjadikan Islam sebagai ideologi dan mewujudkan negara Islam boleh jadi disebabkan oleh semangat yang berlebihan yang tidak diimbangi dengan pengetahuan yang memadai.¹⁵

Seperti halnya pendapat Musdah Mulia yang menyebut bahwa gagasan kembali ke Islam yang diperjuangkan kelompok revivalis ini selalu bermakna kembali kepada Islam yang tekstualis yang semata-mata hanya bertumpu pada apa yang ada dalam teks dan mengabaikan konteks historisnya sehingga cenderung statis, ahistoris, eksklusif, bias gender, dan sarat dengan nilai-nilai patriarki.¹⁶ Ada satu dua kelompok revivalis Islam

¹⁴ Haedar Nashir, *Gerakan Islam*, 108.

¹⁵ KH. Abdurrahman Wahid (ed), *Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institute, 2009), 234.

¹⁶ Isngadi Marwah Atmadja, *Revivalisme Islam dan Nasib Politik Perempuan Indonesia*, dalam Budi Asyhari dan Subkhi Ridho (ed), *Perempuan, Islam, Indonesia Mengurai Jebakan Revivalisme Keagamaan* (Yogyakarta: LSIP, 2010), 102.

yang saklek, memandang Islam sebagai monument mati yang dipahat pada abad ke-7 Masehi yang tak boleh disentuh tangan sejarah. Inilah yang disebut revivalisme buta.¹⁷

Dari beberapa kelompok revivalisme Islam di Indonesia, yang paling santer menyuarakan penolakan terhadap ideologi gender adalah HTI. Oleh karena itu, untuk memperkuat diskursus di atas penulis memberikan contoh dengan melihat peran politik perempuan HTI. Bermula dari pandangan HTI tentang peran politik perempuan yang selalu didahului dengan kritik terhadap term-term 'Barat' seperti gender, feminisme dan lain sebagainya. HTI melihat gagasan keadilan dan kesetaraan gender (KKG) adalah sebuah konspirasi kelanjutan dari upaya menghapuskan peradaban Islam dan mencegah kebangkitannya kembali melalui penghancuran keluarga-keluarga muslim. Untuk mempertahankan hegemoninya, Barat, yang masih menaruh dendam terhadap Islam, memanfaatkan berbagai isu seperti demokrasi, HAM, pluralisme, dan KKG sendiri. HTI juga mencurigai bahwa dibalik opini KKG sesungguhnya tersimpan bahaya besar bagi eksistensi keluarga dan masyarakat muslim. Konspirasi keji di balik program pemberdayaan perempuan versi KKG ini bertujuan untuk menghancurkan kepemimpinan laki-laki dalam keluarga dan masyarakat, sekaligus menghapuskan peran keibuan yang menjadi tulang punggung lahirnya generasi muslim yang berkualitas. Oleh karena itu, langkah-langkah KKG ini menurut HTI harus diwaspadai.¹⁸

Mereka menilai isu gender merupakan alat yang paling ampuh untuk merusak perempuan Islam. Isu KKG bukan solusi mengatasi keterpurukan perempuan, tetapi justru menambah persoalan baru yaitu perempuan merasa terhina ketika melakukan tugas-tugas domestik karena tidak dianggap berkontribusi untuk ekonomi bangsa, karena tidak menghasilkan income. Inilah yang membuat perempuan-perempuan meninggalkan tugas domestiknya, yang oleh Allah telah dibuat seharmonis mungkin, yang pada akhirnya institusi rumah tangga rusak dan generasi hancur.

¹⁷ *Ibid.*, 106.

¹⁸ Ummu Fathimah, "Keadilan dan Kesetaraan Gender: Gagasan yang harus diwaspadai" dalam *Al-Wa'ie Media Politik Dakwah*, No.75 Tahun VII, 1-30 November 2006, 9.

Terlepas dari logika ideologis yang berbasis pada semuanya harus berdasarkan nilai-nilai Islam dan bukan barat, menurut penulis tidak seharusnya HTI mencurigai atau mewaspadaai konsep KKG ini. Sebab KKG merupakan salah satu gerakan yang muncul untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan bagi perempuan, sebuah cita-cita yang sejalan dengan pesan dasar ajaran Islam.

Padalah jika dicermati dan dipahami dengan bijak, kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi yang mencerminkan adanya kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Sedangkan keadilan gender adalah kondisi dan perlakuan yang adil bagi perempuan dan laki-laki.

Penulis melihat rupanya HTI salah menilai konsep gender dan tidak secara komprehensif memahaminya. KKG bukan persoalan kontribusi perempuan terhadap ekonomi bangsa, ataupun menghancurkan kepemimpinan laki-laki, akan tetapi KKG merupakan konsep yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi laki-laki dan perempuan di setiap sektor kehidupan, termasuk di sektor domestik sekalipun.

Bukan hanya mengkritik term KKG, HTI juga berpendapat bahwa feminisme telah membawa banyak perubahan di belahan bumi mana pun. Banyaknya kaum perempuan yang telah berhasil mengekspresikan diri, bekerja di bidang apapun yang diinginkannya, tanpa harus takut dengan berbagai hal tabu yang selama ini dianggap mengekang mereka merupakan salah satu bukti menurut HTI. Bahkan hal ini dianggap sebagai awal persoalannya karena selain membawa dampak positif, feminisme juga membawa dampak buruk bagi masyarakat secara keseluruhan. Kebebasan yang ditawarkan feminisme bagi HTI berakibat pada runtuhnya struktur keluarga, meningkatnya angka perceraian, merebaknya free-sex, meningkatnya kasus aborsi, dilema perempuan karir, sindrom *cinderella complex*, pelecehan seksual, anak-anak bermasalah, dan lain-lain. Walhasil yang terbentuk bukan masyarakat yang kokoh, tetapi sebuah masyarakat yang penuh

dengan konflik yang tidak memberikan ketenangan dan kepastian, karena berbagai penyimpangan banyak terjadi di dalamnya.¹⁹

Beberapa kritik HTI terhadap feminisme antara lain: *pertama*, ketidakadilan gender yang dikatakan telah melembaga secara universal dalam struktur masyarakat patriarkhis sesungguhnya terbantah oleh realitas bahwa berbagai fakta yang disebut-sebut sebagai persoalan perempuan ternyata juga dialami oleh kaum laki-laki. Bahkan di dunia ketiga yang mayoritas negeri kaum muslim, persoalan-persoalan seperti kemiskinan, diskriminasi, kekerasan, kebodohan, malnutrisi dan sebagainya kini menjadi persoalan-persoalan krusial yang dihadapi masyarakat secara keseluruhan sebagai implikasi dari penerapan sistem kapitalisme yang lemah dan rusak, dengan sistem politiknya yang bobrok, sistem sosialnya yang rapuh, dan sebagainya.²⁰

Kedua, ide kesetaraan gender yang diusung feminisme merupakan gagasan yang absurd, ambivalen dan utopis. Sebab sebagaimana sudah dijelaskan, kaum feminis meyakini, bahwa sifat keperempuanan yang dianggap lebih banyak merugikan perempuan bukan merupakan bentukan yang alami (*nature/kodrati*) melainkan dibentuk oleh kebudayaan (*nurture*). Untuk itu mereka menuntut adanya perubahan konstruksi sosial budaya baik secara kultural maupun struktural. Dengan begitu diharapkan pembagian peran yang berspektif gender tidak ada lagi. Dalam hal ini mereka yakin, bahwa ketika suatu saat masyarakat bisa memandang perempuan sebagai manusia (bukan atas dasar gender), pembagian peran domestik *vis a vis* publik pun akan cair dengan sendirinya. Artinya semua orang akan mampu berkiprah dalam bidang apapun yang diinginkannya tanpa harus khawatir dianggap menyalahi kodrat dan sebagainya.

Ketiga, cara pandang feminisme yang individualistik dan cenderung emosional juga telah menempatkan persoalan perempuan seolah terpisah dari persoalan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini terkait dengan

¹⁹Nurfaizah dan Najmah, 'Membangun Keluarga Ideologis' dalam *Al-Wa'ie Media Politik Dakwah*, No.64 Tahun V, 1-28 Februari 2005, 14.

²⁰Najmah Sa'idah & Husnul Khotimah, *Revisi Politik Perempuan Bercermin Pada Shahabiyat*, (Jakarta: IdeA Pustaka Utama, 2003), 78.

pandangan demokrasi yang menganggap, bahwa masyarakat adalah kumpulan individu-individu yang merdeka, dengan laki-laki di satu sisi dan perempuan di sisi yang lain. Dengan demikian, di dalam demokrasi prinsip individualisme menjadi sesuatu yang inheren. Prinsip ini telah menempatkan diri, ego, jenis dan kelompok sebagai sumber orientasi. Ketika muncul persoalan-persoalan yang menyangkut komunitas perempuan, mereka lantas memandang persoalan tersebut sebagai urusan internal komunitas perempuan. Akibatnya, pemecahan yang dimunculkannya pun hanya dilihat dari satu perspektif saja, yakni perspektif perempuan. Padahal realitasnya, masyarakat bukan hanya sekadar terbentuk dari individu-individu saja, tetapi juga dari kesamaan pemikiran, perasaan, dan aturan yang diterapkan, yang disertai dengan adanya interaksi terus menerus.²¹

Keempat, politik dalam perspektif feminisme seolah terbatas pada aspek kekuasaan dan legislasi saja. Akibatnya ide, pemberdayaan peran politik perempuan pun selalu diarahkan untuk menjadikan kaum perempuan mampu melibatkan diri dan berkiprah seluas-luasnya di wilayah politik formal; seperti di lembaga-lembaga pemerintahan atau kekuasaan, lembaga legislasi, partai politik, dan lain-lain. Hal ini sebetulnya terkait dengan logika feministik yang diilhami oleh teori mekanisme kekuasaan mayoritas yang ada dalam logika demokrasi yang menganggap apabila perempuan terlibat dalam kebijakan maka masalah perempuan akan terselesaikan. Padahal, dalam tataran praktik, masalah ada tidaknya hubungan antara kiprah politik perempuan seperti itu dan tuntasnya persoalan perempuan masih sangat *debatable*. Banyak fakta justru menunjukkan bahwa keberadaan perempuan di parlemen atau di puncak kekuasaan sekali pun tidak lantas menjamin tuntasnya persoalan-persoalan perempuan. HTI mencontohkan kasus Indonesia yang pernah kepala negaranya perempuan, ternyata 'nasib' perempuan tidak lebih baik daripada nasib perempuan yang ada di negeri yang kepala negaranya seorang laki-laki. Demikian juga realitas keterpurukan yang terjadi Bangladesh ketika dipimpin oleh Begum Khalida Zia dan Sheikh Hasina Wajed.²²

²¹ *Ibid.*, 80.

²² *Ibid.*, 81.

Kritik HTI terhadap feminisme di atas harus ditilik ulang karena menurut penulis dengan mengatakan feminisme menjadi penyebab free sex, aborsi, pelecehan seksual, anak-anak bermasalah seperti halnya diungkap di atas, itu berarti secara tidak langsung HTI juga mengatakan bahwa penyebab kebobrokan moral di masyarakat adalah perempuan. Alih-alih membela perempuan, pernyataan HTI justru semakin membuat perempuan menjadi “korban” yang selalu dipersalahkan.

Selain itu, dalam memahami gender, HTI masih belum mampu memilah antara sex dan gender, sehingga melihat sesuatu yang bersifat kodrati menjadi bawaan yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan.

Kesalahan pemahaman bukan hanya pada beberapa term di atas, HTI juga menerjemahkan makna demokrasi secara sepihak, dan tidak menggunakan kacamata pemikiran secara umum. Nilai individualistik pada demokrasi hanya terdapat pada penghormatan terhadap hak, tidak bersifat umum seperti halnya dipahami oleh HTI. Selain itu prinsip musyawarah dalam demokrasi adalah bantahan keras terhadap tuduhan HTI tersebut di atas.

Aspek perjuangan politik perempuan harusnya juga dilihat secara bijak oleh HTI. Perjuangan keadilan gender selama ini bukan hanya dari segi kuantitas saja, seperti apa yang diungkapkan oleh HTI pada point keempat di atas. Aspek kualitas juga menjadi perhatian penting dalam perjuangan keadilan gender seperti pemberdayaan ekonomi perempuan, perhatian terhadap kesehatan ibu dan anak, meminimalisir kekerasan terhadap perempuan (yang akhirnya ditegaskan dengan UU KDRT) dll.

Dalam mencontohkan kepemimpinan perempuan HTI juga menafikkan tokoh-tokoh seperti Khadijah, Aisyah, Ratu Balqis, atau perempuan pemimpin yang mendulang emas dalam kepemimpinannya.

Dari pengamatan penulis, secara hermeneutis penulis melihat terdapat keterkaitan erat antara persepsi para pemikir di Indonesia tentang perempuan dan latar *weltanschauung* mereka. Latar yang dimaksud menunjuk pada prasangka, kondisi historis (*liistorical situatednes*), dan tradisi mereka. Secara langsung maupun tidak, anasir hermeneutik itu mewarnai horison mereka dalam menderivasi pesan tekstual ajaran Islam seputar relasi gender.

Jadi pemahaman mereka itu tidak berawal dari kekosongan dalam situasi budaya yang vakum, melainkan muncul sebagai refleksi langsung dari gugusan pengalaman panjang pengetahuan dan kehidupan mereka. Persepsi mereka mengenai kesadaran gender (*gender issues*), secara langsung berkaitan dengan teks-teks doktrinal Islam yang cenderung membenci perempuan (misoginis). Akan tetapi penulis melihat bahwa hal itu tidak hanya karena Islam hadir di tengah masyarakat bertradisi "*man is the best and the first*" melainkan juga berlangsungnya kesimpangsiuran dalam memahami otoritas teks di satu sisi, dan dimensi penafsiran di sisi lain yang acap kali bermuara pada reproduksi wacana yang bertentangan dengan nilai kesetaraan gender. Agaknya itu memang konsekuensi logis dimenangkannya otoritas tradisi Islam demi memelihara idealitas Islam sebagai agama samawi. *Trend* paradigmatis "mensubordinasi konteks atas teks" menjadi fenomena umum dan nyaris dalam keseluruhan dinamika keilmuan Islam pasca abad pertengahan Hijriyah yang berimbas pada banyaknya ajaran Islam kehilangan konteks sosialnya (sekaligus relevansi sosialnya).

Bagi kaum revivalis (atau kadang-kadang disebut fundamentalis) seperti HTI, MMI dan KPPSI, solusi Islam bagi mereka adalah antitesis dari tatanan dunia yang dianggap bobrok dan amoral. Praktek fundamentalisme mereka selanjutnya terejawantah dalam bentuk berpakaian sebagaimana Arab jaman Nabi, bergaul ala Rasulullah dan sahabat dan pengaturan ketat kehidupan perempuan di dalam maupun di luar kelompoknya. Pertanyaannya kemudian, kenapa revivalisme Islam selalu mengambil bentuk kontrol terhadap perempuan dalam relasi gendernya? Ternyata dalam banyak tradisi perempuan merupakan simbol identitas dan penjaga kelompoknya. Perempuan dalam kelompok manapun selalu menjadi instrumen efektif untuk menjadi contoh pelaksana ideologi dan teologi masing-masing kelompok. Baiknya perempuan merupakan indikator baiknya suatu kelompok. Maka kebijakan yang diberlakukan adalah mencegah perempuan dari hal-hal yang bisa mengarah pada citra buruk.²³

²³ Mustaghfiroh Rahayu dan Mukhotib MD, *Islam dan Gerakan Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 64.

Dalam konteks bernegara di Indonesia, kontrol terhadap perempuan tersebut mendapatkan bentuknya pada perda-perda syari'at yang diskriminatif terhadap perempuan. Sejumlah peraturan memang terlihat secara langsung maupun tidak, diskriminatif terhadap hak-hak perempuan untuk berekspresi di ruang publik. Misalnya, terdapat peraturan daerah (Perda) yang melarang perempuan keluar rumah di atas pukul 10 malam. Peraturan ini adalah bagian dari peraturan yang melarang pelacuran. Alasan pemberlakuan peraturan ini adalah bahwa perempuan yang keluar pada jam-jam tersebut bisa mengundang kemaksiatan. Peraturan seperti ini tidak hanya tidak rasional, tetapi juga tidak sensitif terhadap hal-hal lain yang mungkin saja terjadi pada jam-jam tersebut. Misalnya, seorang perempuan dengan beban keluarga yang cukup tinggi, sementara di sisi lain suaminya tidak pernah memberikan penghidupan yang layak kepada dia, maka dia harus melakukan kerja apa saja yang halal, misalnya berjualan kue hingga malam hari. Jika peraturan semacam ini diberlakukan secara semena-mena tanpa melihat konteks yang melatarbelakangi seorang perempuan keluar pada malam hari, maka nyata belaka bahwa formalisasi hukum Islam lewat Perda-perda sebagaimana yang diusung oleh para revivalis Islam dalam banyak kasus justru menyengsarakan perempuan. Fakta inilah yang sudah lama diwanti oleh Muslim Abdurrahman lewat komentarnya bahwa: "pemberlakuan syariah justru akan menjadikan perempuan sebagai korban pertama". Alasannya, dalam syari'ah Islam banyak regulasi yang jika diterapkan secara ketat akan mengancam perempuan.²⁴

V. Penutup: Harapan dari Kekhawatiran

Sebagai epilog dari perbincangan panjang di atas penulis ingin mengutip kata-kata bijak KH. Musthofa Bisri:

"Andai masing-masing terus belajar, saling mendengarkan dengan yang lain, tentu pemahaman mereka akan lebih baik dan lengkap. Karena sebenarnya, kebenaran kita berkemungkinan salah, dan kesalahan orang lain berkemungkinan benar. Siapapun yang telah tertutup mata hatinya – antara lain karena merasa diri paling pintar dan paling benar

²⁴ Pradana Boy ZTF, *Fikih Jalan Tengah*, 92-93.

– tidak akan mampu melihat pemahaman lain yang berbeda, yang tersisa adalah arogansi (takabur) dan penolakan terhadap yang lain.”²⁵

Jika boleh berharap, penulis ingin kata-kata bijak KH. Mustofa Bisri di atas dapat terjadi di kemudian hari sehingga perjuangan keadilan gender terbebaskan dari “virus klaim kebenaran” revivalisme Islam. Akhirnya Islam benar-benar menjadi rahmat bagi semesta alam, termasuk bagi perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Maftuh Abegebriel dan Ibida Syitaba, “Fundamentalisme Islam, Akar Telogis dan Politis,” dalam *Negara Tuhan; The Thematic Encyclopaedia*, Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2004.
- Al-Wa’ie Media Politik Dakwah*, No.64 Tahun V, 1-28 Februari 2005.
- Al-Wa’ie Media Politik Dakwah*, No.75 Tahun VII, 1-30 November 2006.
- Andi Muawiyah Ramly dkk, *Demi Ayat Tuhan, Upaya KPPSI Menegakkan Syariat Islam*, Jakarta: OPSI, 2006.
- Budi Asyhari dan Subkhi Ridho (ed), *Perempuan, Islam, Indonesia Mengurai Jebakan Revivalisme Keagamaan*, Yogyakarta: LSIP, 2010.
- Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syari’at Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, Jakarta: PSAP, 2007
- John L Esposito dan John O Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek*, terj. Rahman Astuti, Bandung: Mizan, 1999.
- KH. Abdurrahman Wahid (ed), *Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta: The Wahid Institute, 2009.
- Khamami Zada, *Islam Radikal*, Jakarta: Teraju, 2002
- M. Amin Abdullah, *Studi Agama, Normativitas atau Historisitas* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme*, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2002.

²⁵ KH. Abdurrahman Wahid, *Ilusi Negara*, 235.

Mustaghfiroh Rahayu dan Mukhotib MD, *Islam dan Gerakan Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2007.

Najmah Sa'idah & Husnul Khotimah, *Revisi Politik Perempuan Bercermin Pada Shahabiyat*, Jakarta: IdeA Pustaka Utama, 2003.

Pengantar Makalah Konferensi *Khilafah International* pada 12 Agustus 2007.

Pradana Boy ZTF, *Fikih Jalan Tengah, Dialektika Hukum Islam dan Masalah-Masalah Masyarakat Modern*, Jakarta: Hamdalah, 2008.

Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2006.

Tashwirul Afkar, Edisi No. 5 Tahun 1999.

http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Mujahidin_Indonesia